

EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERGURUAN TINGGI: SEBUAH STUDI LITERATUR

Budgetary Efficiency and Its Impact on Higher Education: A Literature Review

Desi Ratna Dewi^{1*} , Dini Kamilia Salma² , Dwi Utami³

Program Studi Pendidikan Akuntansi¹⁻³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹⁻³
Universitas Negeri Makassar¹⁻³

Correspondent Email: desiratnadewi@unm.ac.id

Author Email: desiratnadewi@unm.ac.id¹,
dini.kamilia.salma@unm.ac.id², dwi.utami@unm.ac.id³

Received: September 29, 2025. **Revised:** October 12, 2025. **Accepted:**
October 14, 2025. **Issue Period:** Vol.9 No.4 (2025), Pp: 1428-1438

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri. Melalui metode penelitian deskriptif-kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menelaah bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan, terkhusus pada perguruan tinggi negeri. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan efisiensi anggaran dapat menjadi solusi jangka pendek dalam meningkatkan ruang fiskal, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan, penetapan prioritas belanja negara yang tepat, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan berkelanjutan. Penting untuk dilakukan kajian secara mendalam baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya agar tetap dapat mencapai tujuan efisiensi yang sebenarnya tanpa mengorbankan kualitas dan pemerataan layanan publik, terutama pada sektor-sektor produktif seperti sektor pendidikan tinggi negeri.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran; Perguruan Tinggi; Studi Literatur

Abstract: This study aims to examine the impact of government budget efficiency policies on public universities. Using descriptive-qualitative research methods and literature reviews, this study examines the impact of budget efficiency policies on the education sector, particularly on public universities. The results indicate that although budget efficiency policies can be a short-term solution to increase fiscal space, their effectiveness depends heavily on the quality of planning, the setting of appropriate state spending priorities, the implementation of a performance-based budgeting system, and the strengthening of transparency and accountability through an effective and sustainable monitoring and evaluation system. It is important to conduct in-depth studies of both planning and implementation to achieve the true efficiency goals without sacrificing the quality and equity of public services, especially in productive sectors such as the public higher education sector.

Keywords: Budget Efficiency; Higher Education; Literature Study



DOI: 10.52362/jisamar.v9i4.2083

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kebijakan efisiensi anggaran telah dilaksanakan secara masif sejak awal tahun 2025 atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efisien, sekaligus dimaksudkan untuk menekan defisit fiskal. Efisiensi anggaran diartikan sebagai upaya mengurangi pemborosan dalam pengeluaran dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak ekonomi tinggi. Pemerintah mengharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini maka setiap pengeluaran yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah [1].

Efisiensi anggaran sebagai bentuk dari strategi fiskal bertujuan mengurangi pemborosan. Literatur yang tersedia dalam memberikan panduan empiris bagaimana pemerintah daerah dan pusat dapat mengelola efisiensi tanpa mengorbankan kualitas program masih minim. Hal ini dapat celah, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berkelanjutan terutama pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Pemotongan anggaran yang bertujuan untuk efisiensi memerlukan pengelolaan yang tepat dan bijaksana karena dapat mempengaruhi *output* dan *outcome* pembangunan jangka panjang [2].

Studi Bappenas [3] menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran tanpa dasar analisis kinerja seringkali justru menurunkan kualitas layanan dasar pada sektor-sektor produktif. Abbasov [4] mengungkapkan bahwa meskipun pemotongan anggaran dapat memberikan keringanan fiskal jangka pendek, pemotongan tersebut membebankan biaya jangka panjang yang signifikan pada layanan publik, utamanya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keselamatan publik. Transparansi dan evaluasi menjadi kunci dalam menjamin efektivitas kebijakan efisiensi anggaran. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang baik pemangkasan anggaran dapat menjadi kontraproduktif [5].

Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya menyoar pada sektor non produktif tetapi juga pada sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pada sektor pendidikan telah menimbulkan berbagai kekhawatiran. Penting untuk diingat bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berdampak signifikan terhadap kemajuan bangsa. Pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan justru akan mengakibatkan efek domino jangka panjang, salah satunya yaitu menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan yang menurun dapat berdampak pada penurunan daya saing sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang, berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, dan memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi [6]. Pemangkasan anggaran juga dinilai dapat menyebabkan terganggunya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, penurunan mutu pendidikan, dan ancaman terhadap kesejahteraan pendidik.

Studi oleh Utami, et al. [7] menyoroiti pentingnya efisiensi anggaran yang tetap mempertahankan mutu pendidikan, dengan menyarankan pengurangan pada komponen non-esensial dan menjaga belanja langsung yang berkontribusi terhadap kualitas akademik. Kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, meskipun bertujuan untuk mengurangi pemborosan, berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat pencapaian tujuan pengembangan sumber daya manusia yang unggul [8].

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang menaungi Perguruan Tinggi Negeri menjadi salah satu lembaga yang terdampak oleh diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun. Hal ini mendorong pelaksanaan efisiensi di lingkungan kampus diberlakukan sejak adanya kebijakan tersebut, di antaranya melalui penghematan biaya utilitas, pengurangan pegawai, pelaksanaan metode belajar secara hibrida, pembatasan akses dan aplikasi berlangganan, sampai dengan penundaan dan pengurangan dana riset. Kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti keterbatasan dukungan fasilitas penunjang akademik, penundaan proses akreditasi, serta pengurangan alokasi dana untuk program pengembangan mahasiswa [2].



Perguruan tinggi memiliki peranan yang penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu negara [9]. Perguruan tinggi berperan dalam menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan bersaing. Selain itu, sebagai salah satu penentu kualitas sumber daya manusia, perguruan tinggi yang berkualitas pada akhirnya berdampak pada arah pembangunan suatu bangsa melalui kualitas pemimpin yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia mencapai mutu atau kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pemangkasan anggaran yang diberlakukan sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia dapat melumpuhkan proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi jika tidak disertai dengan pengelolaan anggaran yang tepat. Beberapa pengamat pendidikan menilai efisiensi hanya akan menurunkan mutu pendidikan tinggi, melemahkan riset, dan menjauhkan dosen dari kesejahteraan. Fungsi tridharma perguruan tinggi juga dikhawatirkan akan ikut terdampak. Para dosen kini menghadapi tantangan tersendiri dalam melaksanakan pengabdian dan penelitian dikarenakan adanya kebijakan tersebut.

Studi Febriyanti, et al. [10] yang menganalisis persepsi, sikap, serta tanggapan dari mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam studinya memiliki pandangan skeptis bahkan cenderung negatif terhadap kebijakan efisiensi anggaran karena dianggap mengurangi kualitas layanan pendidikan, tidak menjamin pemerataan akses pendidikan, dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses perumusannya.

Pemangkasan anggaran yang terjadi pada perguruan tinggi juga dikhawatirkan akan menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Studi Husted & Kenny [11] turut memberikan bukti bahwa pemangkasan anggaran juga dapat berdampak negatif terhadap perguruan tinggi negeri dalam menjalankan kegiatan riset. Analisis mereka yang melibatkan 152 universitas negeri menunjukkan hubungan positif antara pemangkasan anggaran dan produktivitas riset. Pemangkasan anggaran sebesar 10% dapat mengurangi 8,4% paten yang diberikan.

Studi Guraja, et al. [12] yang berfokus pada tinjauan dampak pemangkasan anggaran negara dalam hal alokasi dan bantuan keuangan terhadap perguruan tinggi negeri di AS melalui tinjauan pustaka sistematis mengungkapkan bahwa meskipun pemangkasan anggaran belum menunjukkan dampak yang signifikan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan biaya kuliah, total biaya pendidikan, dan dosen paruh waktu; serta menurunkan jumlah paten yang diberikan dan tingkat kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Zhang [13] melakukan studi penelitian untuk menemukan korelasi antara tingkat kelulusan di perguruan tinggi negeri dan alokasi anggaran pemerintah menemukan bahwa peningkatan 10% alokasi anggaran pemerintah menghasilkan peningkatan sebesar 0,75% tingkat kelulusan, dan pada saat yang sama, penurunan 10% dalam alokasi anggaran pemerintah mengakibatkan penurunan sebesar 0,56% tingkat kelulusan.

Di sisi lain, Sari, et al. [2] menemukan bahwa penerapan efisiensi anggaran telah mendorong inisiatif positif di perguruan tinggi, seperti peningkatan pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kolaborasi eksternal, dan optimalisasi penggunaan dana operasional secara tepat sasaran, yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat memicu efisiensi dan inovasi dalam layanan akademik.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri didasarkan pada beberapa perspektif. Teori Federalisme Fiskal menjelaskan kompleksitas dalam pendistribusian anggaran antar tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kemudian teori pilihan publik mengkritisi kebijakan penghematan anggaran dapat menyebabkan terdegradasinya kualitas barang publik yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas sosial. Selain itu, teori pilihan publik juga mengkritisi bagaimana keputusan-keputusan politik dan kebijakan publik seperti efisiensi anggaran dibuat oleh individu dalam pemerintahan dapat dipengaruhi oleh motivasi politik dan kepentingan pribadi (*self-interest*) daripada hanya demi kepentingan publik.

Keterlibatan kepentingan politik dalam penyusunan anggaran berisiko menimbulkan deviasi alokasi yang berpihak pada kepentingan pemerintah. Fenomena ini juga ditangkap melalui teori keagenan, yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara pihak pengelola anggaran dan publik. Pengalihan anggaran pendidikan untuk kepentingan pemerintah dinilai dapat merusak sistem pendidikan, yang menyebabkan penurunan kualitas dan terbatasnya kesempatan untuk pendidikan berkualitas.

Melalui studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian diantaranya 1) bagaimana urgensi dilakukannya efisiensi anggaran terutama pada sektor-sektor vital di Indonesia? 2) bagaimana dampak efisiensi anggaran bagi pendidikan tinggi di Indonesia? dan 3) bagaimana implikasi efisiensi



anggaran pada pendidikan tinggi di Indonesia? Penelitian ini juga berusaha mensintesis hasil penelitian sebelumnya untuk mendapat gambaran dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait efisiensi anggaran khususnya bagi pendidikan tinggi. Beberapa hasil penelitian sebelumnya akan menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menelaah dampak pemangkasan anggaran negara terhadap berbagai variabel di perguruan tinggi negeri.

Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh serta mendorong terbukanya diskusi mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk merumuskan berbagai solusi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

II. METODE DAN MATERI

2.1. Kajian Teoritis

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran merujuk pada penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal [14]. Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa dalam pengalokasian sumber daya dalam pemerintahan, ketika pemotongan anggaran dilakukan secara serentak pada berbagai pos anggaran, hal ini dapat menyebabkan hasil yang kurang optimal jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi [4].

Pada sudut pandang federalisme fiskal pengurangan anggaran di tingkat pusat tanpa peningkatan kapasitas fiskal di tingkat daerah dapat memperdalam kesenjangan antarwilayah dalam penyediaan layanan pendidikan. Kebijakan penghematan anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan terganggunya stabilitas sosial. Lebih lanjut, teori *human capital* menyebutkan bahwa investasi pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi [15].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memerlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat agar pengelolaan anggaran dapat tepat sesuai sasaran [16]. Penelitian oleh Sari, et al. [2] menyatakan bahwa meskipun pemberlakuan Inpres No 1 Tahun 2025 pada perguruan tinggi di Provinsi Bangka Belitung mendorong timbulnya inovasi pada perguruan tinggi, tetapi di sisi lain juga menghambat pembangunan infrastruktur dan berpotensi meningkatkan kenaikan biaya kuliah (UKT). Lebih lanjut, penelitian oleh Robiansyah [17] menyebutkan bahwa efisiensi anggaran dapat menghambat akses pendidikan, penurunan kualitas riset dan inovasi, serta penurunan kesejahteraan masyarakat.

Teori federalisme fiskal dan teori *human capital* menunjukkan bahwa salah satu investasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang adalah investasi pada sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui sektor pendidikan. Tetapi pemotongan anggaran yang diberlakukan untuk tujuan efisiensi, dapat menghambat proses akumulasi *human capital* tersebut. Oleh karena itu, efisiensi fiskal yang dilakukan tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap Pembangunan manusia dapat berujung pada penurunan daya saing nasional dan memperlebar ketimpangan sosial.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan proses yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data melalui berbagai sumber Pustaka untuk tujuan penelitian [18]. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis baik buku, artikel jurnal, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

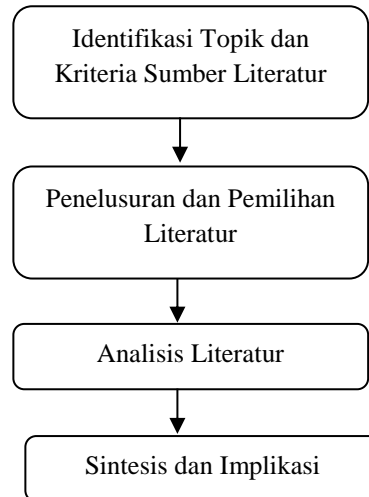
Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber literatur terkait yang dapat mendukung temuan dan pembahasan penelitian. Peneliti mencari sumber kepustakaan melalui *google scholar*, *garuda*, dan *science direct* dengan kata kunci Inpres presiden no 1 tahun 2025, efisiensi anggaran, dan pendidikan tinggi. Pemilihan sumber rujukan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas jurnal, dan kebaruan data.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis konten. Analisis konten adalah metode untuk mengidentifikasi baik konsep, tema, kata kunci, dan topik utama yang dikaji dalam sumber penelitian. Data yang diperoleh dikumpulkan dan diseleksi sesuai relevansi isi lalu dikategorikan dan diinterpretasikan sehingga memperoleh pemahaman mendalam perihal permasalahan utama penelitian.

Analisis konten memungkinkan penulis untuk dapat menyusun deskripsi yang lebih sistematis sehingga dapat memberikan pembahasan yang mendalam terkait topik penelitian. Dengan melakukan konten analisis,



diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif perihal efisiensi anggaran akibat Inpres No 1 Tahun 2025 terhadap Pendidikan Tinggi. Proses pengumpulan dan sintaksis data penelitian digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1. Diagram Alur Langkah Penelitian

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Efisiensi anggaran merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara bijaksana agar belanja negara sesuai dengan prioritas pembangunan. Tetapi, kebijakan efisiensi anggaran yang tidak proporsional dapat menimbulkan dampak serius karena akan dapat berdampak pada program-program pembangunan jangka panjang termasuk pada sektor-sektor esensial seperti sektor pendidikan. Walaupun kebijakan efisiensi ini dapat memperbaiki struktur anggaran dan meningkatkan ruang fiskal, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, serta tingkat akuntabilitas birokrasi [5].

3.1. Urgensi Efisiensi Anggaran 2025

Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan fiskal yang umum dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan merupakan kebijakan dalam penggunaan anggaran seminimal mungkin untuk hasil semaksimal mungkin. Pemotongan anggaran belanja pemerintah yang ditujukan untuk efisiensi dapat membantu menstabilkan proporsi pendapatan dan belanja negara sehingga kondisi fiskal suatu negara dapat menjadi lebih stabil [20], [29].

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menandai kebijakan baru pemerintah dalam mendorong efisiensi belanja negara. Pemangkasan beberapa pos anggaran hingga 90% dilakukan kepada seluruh instansi baik Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Mereka diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Lebih lanjut, Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja negara tidak hanya menasar sektor non strategis tetapi juga pada sektor strategis seperti pendidikan dan Kesehatan.

Efisiensi anggaran 2025 dimaksudkan untuk menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, efisiensi anggaran mencakup pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun serta pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun [9]. Efisiensi anggaran ini juga bagian dari upaya untuk menyeimbangkan antara potensi pendapatan dengan prioritas belanja negara [21]. Efisiensi anggaran merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal akibat



penurunan penerimaan negara, utang, atau kebutuhan pembiayaan sektor lain, menghindari pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas belanja negara dan juga sebagai upaya pengendalian defisit anggaran agar tetap dalam batas aman.

Hartono [22] menyebutkan bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan untuk mendukung beberapa program seperti pembayaran hutang luar negeri yang telah jatuh tempo dan program makanan bergizi gratis (MBG). Efisiensi anggaran memiliki potensi besar dalam memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menekan belanja operasional yang kurang produktif dan mengarahkan anggaran ke sektor strategis. Selain itu dengan efisiensi anggaran pemerintah dapat menciptakan struktur anggaran yang lebih sehat dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi [5].

3.2. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Sektor Pendidikan Tinggi Negeri

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan daya saing nasional. Melalui fungsi tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat institusi pendidikan tinggi menjadi tulang punggung dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan menghasilkan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan alokasi dana bagi perguruan tinggi negeri. Kondisi ini mengancam stabilitas dan keberlangsungan fungsi utama pendidikan tinggi di Indonesia.

Johnstone & Marucci [23] menyatakan bahwa efisiensi anggaran berperan strategis dalam menentukan kualitas pendidikan, karena dapat memperkuat aksesibilitas, keberlanjutan finansial, dan mutu layanan. Akan tetapi, efisiensi yang tidak selektif dapat berdampak kontraproduktif terhadap pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi. Sejalan dengan hal ini Sari, et al. [2] menjelaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran memberikan dampak positif bagi pemerintah Indonesia dalam efisiensi penggunaan dana, tetapi hal tersebut juga memberikan dampak negatif yang signifikan pada sektor Pendidikan. Kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan tinggi pada tahun 2025 berpotensi menghambat akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan di Indonesia [6].

Kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, meskipun bertujuan untuk mengurangi pemborosan, berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat pencapaian tujuan pengembangan sumber daya manusia yang unggul [8]. Pemotongan hampir 50% dari total anggaran pendidikan juga menyebabkan meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan instansi pendidikan terkait [25].

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran terlebih dahulu perlu dilakukan kajian disertai dengan evaluasi secara mendalam, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya, agar tetap dapat mencapai tujuan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Efisiensi anggaran seharusnya bukan hanya soal pengurangan nominal anggaran semata tetapi juga tentang menjamin keberlangsungan layanan publik secara maksimal dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

3.3. Implikasi terhadap Kualitas & Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya sadar dalam membentuk potensi diri dan sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kebijakan efisiensi anggaran atas instruksi presiden memangkas anggaran pendidikan pada beberapa pos anggaran seperti pos anggaran sosial dan beasiswa senilai 9% dan pos layanan pendidikan sebesar 50% [25]. Hal ini dapat membawa efek pada kenaikan biaya kuliah, pengurangan beasiswa, terhambatnya pembangunan infrastruktur, dan menurunnya kualitas layanan pendidikan.

Data BPS Tahun 2024 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hanya mencapai sebesar 32%, yang mana angka ini masih berada di bawah rata-rata global sebesar 40%. Lebih lanjut, Bernadus, et al. [18] menyatakan bahwa kenaikan biaya pendidikan pada tahun 2024 mencapai 0,46%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diberlakukannya efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran pendidikan, hanya sebagian kecil siswa di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, tanpa pemotongan anggaran pendidikan, biaya kuliah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang dapat memberatkan mahasiswa. Hal ini dapat semakin menurunkan minat dan kemampuan masyarakat dalam melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi.

Selain dalam hal pembiayaan pendidikan, pemangkasan alokasi dana ke perguruan tinggi juga dapat berdampak pada penurunan kualitas riset. Sebagai salah satu ukuran kualitas pendidikan tinggi, salah satu faktor yang menjadi permasalahan dari rendahnya kualitas riset pada pendidikan tinggi di Indonesia adalah rendahnya



anggaran untuk dana riset [26]. Merujuk pada hal ini maka pemangkasan anggaran pendidikan tinggi memicu semakin menurunnya anggaran riset bagi dosen dan menurunkan kualitas riset itu sendiri.

Kebijakan efisiensi yang tidak proporsional dapat memperlebar jurang kesenjangan terhadap akses pendidikan. Sejalan dengan hal ini laporan World Bank [27] menunjukkan bahwa pengurangan anggaran pendidikan di Indonesia berdampak pada meningkatnya kesenjangan akses pendidikan tinggi di wilayah kota besar dan daerah tertinggal.

Perguruan tinggi besar dan berada di perkotaan mungkin mampu bertahan karena mendapatkan akses ke sumber dana alternatif seperti kerjasama pada industry tertentu. Tetapi, hal ini tentu akan berbeda dengan kondisi perguruan tinggi di daerah tertinggal. Perguruan tinggi pada daerah tertinggal akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mempertahankan operasional dan mutu akademiknya. Perbedaan ini pada akhirnya dapat memperparah ketimpangan kesempatan pendidikan antarwilayah.

Pemangkasan anggaran pendidikan tidak hanya menciptakan tekanan ekonomi bagi mahasiswa tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kelulusan dan tingginya angka putus studi. Lebih jauh, kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam upaya pemerataan akses pendidikan tinggi khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Dampak sistemik yang dapat muncul dari pemangkasan anggaran pada pendidikan tinggi mencakup menurunnya kualitas pengajaran, melemahnya kegiatan riset, hingga memburuknya kesejahteraan dosen. Ketika dukungan anggaran berkurang, institusi pendidikan tinggi kesulitan menjalankan fungsi riset secara optimal, yang kemudian berdampak negatif terhadap produktivitas ilmiah, seperti menurunnya jumlah paten dan publikasi. Dalam jangka panjang, situasi ini akan menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, serta melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai motor penggerak kemajuan bangsa.

3.4. Implikasi terhadap SDM, Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Pembangunan Jangka Panjang

Perguruan tinggi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Pada akhirnya, kualitas sumber daya manusia suatu negara akan berdampak pada aspek sosial-ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Pandangan ini sejalan dengan teori human capital yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang [15].

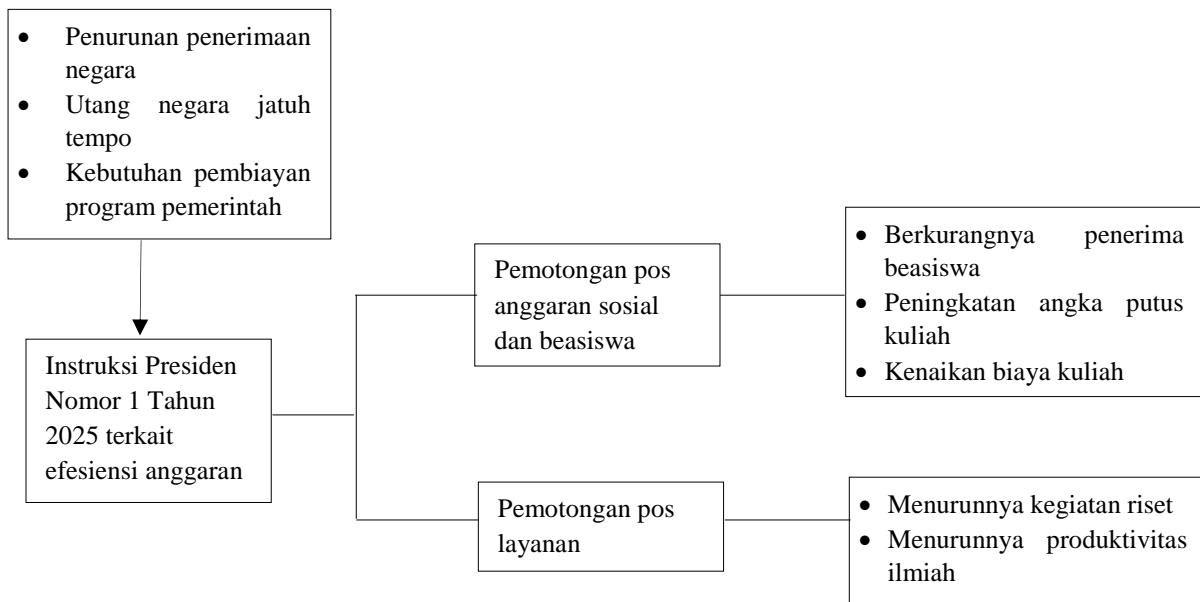
Penelitian oleh Sain & Bozkurt [28] menyatakan bahwa pendidikan sebagai pembentuk sumber daya manusia berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu upaya dalam pembentukan sumber daya manusia merupakan investasi masa depan yang dapat memberikan imbal hasil yang tinggi dalam terciptanya sumber daya yang unggul [19]. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi berkelanjutan pada sektor pendidikan tidak hanya berdampak pada naiknya pendapatan individu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan [24].

Pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan tinggi memiliki implikasi serius terhadap penurunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam aspek inovasi, penelitian, dan pengembangan kompetensi unggul. Penurunan alokasi investasi negara terhadap perguruan tinggi baik dalam bentuk pengurangan dana riset, dukungan fasilitas penunjang akademik, maupun program pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa berpotensi menghambat peran strategis perguruan tinggi negeri sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan, penghasil inovasi, serta institusi pencetak sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika global.

Ketimpangan dalam distribusi anggaran dan akses pendidikan dapat memperparah kesenjangan sosial-ekonomi. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural bagi mobilitas sosial dan berisiko memperkuat eksklusi sosial dan siklus kemiskinan. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran yang tidak disertai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik berpotensi menciptakan beban sosial dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Dengan kata lain, efisiensi fiskal jangka pendek dapat membawa konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih mahal.

Kebijakan yang dilakukan untuk dapat menjaga stabilitas fiskal seharusnya tidak mengorbankan keberlanjutan pembangunan manusia. Investasi pada pendidikan tinggi perlu dipandang tidak hanya sebagai beban keuangan negara tetapi juga investasi masa depan. Menjaga keberlanjutan investasi pada pembangunan manusia bukan semata persoalan keuangan negara, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa.





Gambar 2. Sintesis Hasil Penelitian Terdahulu

3.5. Pertimbangan Kebijakan

Dampak yang ditimbulkan dari pemangkasan anggaran pada perguruan tinggi sangat kompleks. Literatur yang tersedia menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan fiskal yang lebih terarah, kontekstual dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada *sustainability* dan *human capital investment*. Pemangkasan anggaran pendidikan harus dilakukan secara selektif, berbasis kinerja, dan memperhatikan pencapaian tridharma perguruan tinggi.

Kebijakan pemotongan anggaran pendidikan perlu perencanaan yang matang. Perencanaan anggaran yang matang dan terstruktur memungkinkan alokasi dana dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Penganggaran berbasis kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa efisiensi anggaran sejalan dengan kualitas pendidikan. Pendanaan pada perguruan tinggi sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja utama (IKU).

Proses penyusunan anggaran perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar dapat dilakukan pemetaan kebutuhan yang komprehensif serta proyeksi penggunaan dana yang realistis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan fiskal benar-benar mencerminkan kebutuhan publik dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang inklusif, sehingga potensi pemborosan dapat diminimalisir dan sumber daya dialokasikan secara efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam tahap perencanaan, proses penganggaran tidak hanya menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu untuk melakukan penyelarasan prioritas belanja negara. Evaluasi yang cermat terhadap prioritas pengeluaran dengan menetapkan sektor-sektor strategis yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai, serta mengurangi pengeluaran non-esensial yang tidak langsung mendukung tujuan pembangunan nasional. Pemerintah juga dapat mendorong perguruan tinggi untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan memperluas kerjasama dengan berbagai sektor. Melalui pendanaan campuran, perguruan tinggi tidak hanya mengharapkan pemenuhan dana dari pemerintah tetapi juga dapat memperoleh pendanaan dari sektor-sektor lain yang masih terkait.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui good university governance. Efisiensi anggaran tidak hanya berarti pengurangan anggaran tetapi juga optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu,



penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan perlu dilakukan melalui mekanisme digitalisasi dan integrasi berbasis data, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang lebih terbuka, efisien, dan responsif.

Pemerintah juga dapat memberlakukan perlakuan afirmatif bagi perguruan tinggi di daerah tertinggal dan perguruan tinggi bukan badan layanan umum (BLU). Ketimpangan kapasitas finansial antar perguruan tinggi harus diatasi melalui skema dana alokasi khusus pendidikan tinggi agar pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia tetap terjaga. Melalui perlakuan afirmatif, perguruan tinggi yang berada pada daerah tertinggal juga dapat mendapatkan kesempatan memperoleh kesempatan pendanaan yang sama dengan perguruan tinggi di kota besar.

Tabel 1. Pertimbangan Kebijakan Terkait Efisiensi Anggaran

Aspek	Kebijakan
Perencanaan Anggaran	Penganggaran berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) Skema pendanaan khusus bagi perguruan tinggi di daerah tertinggal dan non BLU
Prioritas Belanja Negara	Prioritas belanja pada sektor strategis Diversifikasi pendanaan perguruan tinggi
Tata Kelola Universitas	Optimalisasi sumber dana dan transparansi evaluasi Digitalisasi tata kelola universitas

IV. KESIMPULAN

Pemangkasan anggaran pendidikan tinggi negeri secara garis besar membawa dampak sistemik terhadap menurunnya kualitas pendidikan, produktivitas riset, dan kesejahteraan tenaga akademik. Efek jangka panjangnya berpotensi melemahkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah global dan memperlebar kesenjangan sosial dalam akses pendidikan. Penurunan investasi negara terhadap pendidikan tinggi negeri bukan hanya berdampak pada institusi, tapi juga terhadap masa depan bangsa secara keseluruhan. Untuk menghindari konsekuensi negatif tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan jangka panjang dengan tetap menjaga alokasi anggaran yang memadai untuk sektor-sektor produktif. Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak semata-mata berfokus pada aspek penghematan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan efisiensi anggaran sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, penetapan prioritas belanja negara yang tepat, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, terbuka, dan berkelanjutan. Pemberlakuan khusus bagi perguruan tinggi di daerah afirmasi dan non BLU juga dapat memperkecil ketimpangan pendanaan pada perguruan tinggi antar wilayah di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1980). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- [2] Sari, I., Nurhasanah, S., Utomo, S. A., Syahrani, A., Revalia, T., & Putra, A. R. (2025). Volume 15, Nomor 1, Juni 2025. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 15(1), 119–127. <https://doi.org/10.37598/jimma.v15i1.10>
- [3] Bappenas. (2022). *Laporan Kinerja Pembangunan Nasional Tahun 2021*.
- [4] Abbasov, R. (2025). The influence of budget cuts on public services: An analytical review. *International Journal of Research in Finance and Management*, 8(1), 174–179. <https://doi.org/10.33545/26175754.2025.v8.i1b.439>



DOI: 10.52362/jisamar.v9i4.2083

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [5] Salman, & Ikbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran : Ditinjau. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68–72.
- [6] Putri, D. A. M. D. (2025). Controversial Policy Seeking Balance Between Savings and Basic Needs. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3829>
- [7] Utami, B. S. A., Basya, M. M., & Anindhita, A. Y. (2021). EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 17(2), 98–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/equilibrium.v17i2>
- [8] Yusuf, M., Ali, H., Us, K. A., Islam, M. P., Bhayangkara, U., Raya, J., & Islam, M. P. (2022). FAKTOR YANG MENPENGARUHI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: SISTEM PENDIDIKAN , PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN. 2(1), 77–85.
- [9] Nulhaqim, A. S., Heryadi, R. D., Pancasilawan, R., & Fedryansyah, M. (2015). PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. *Social work jurnal*, 6(2), 154–272.
- [10] Febriyanti, A., Aulia, A., Anggitasari, S., Muzhaffar, R. Z., & Nugraha, J. T. (2025). EFISIENSI ANGGARAN DI ERA PEMERINTAHAN BARU : PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP DAMPAKNYA BAGI PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1), 15–25.
- [11] Husted, T. ., & Kenny, L. . (2018). The effect of reduced support from state government on research in state universities. *Journal of Education Finance*, 44(2), 164–174.
- [12] Guraja, P. K., Badar, M. A., Moayed, F. A., & Kluse, C. J. (2022). Systematic Literature Review of the Impact of State Budget Cuts on Public Higher Education Institutions in the U . S . *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 4278–4287.
- [13] Zhang, L. (2009). Does State Funding Affect Graduation Rates at Public Four-Year Colleges and Universities? *Educational Policy*, 23(5), 714–731.
- [14] Cahyo, R., Suryawati, C., & Harto, P. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(3), 231–240.
- [15] Hanushek, E. A. (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. *Economics of Education Review*, 37, 204–212. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.04.005>
- [16] Hisyam, M., & Siradjuddin. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan : Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan dan Kualitas Outputnya. *Islamic Managemen : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 21–27.
- [17] Robiansyah, F. (2025). Analysis of Education Budget Efficiency in an Islamic Perspective. *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 143–155. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna>
- [18] Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D. (2025). Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia : Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review). *Jurnal Impian : Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 5(1), 109–120. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/5057>
- [19] Deming, D. J. (2022). Four Facts about Human Capital. *Journal of Economic Perspectives*, 36(3), 75–102. <https://doi.org/10.1257/jep.36.3.75>
- [20] Johnson, M., Anderson, P., & Turner, D. (2019). Targeted Fiscal Adjustments and Long-Term Service Outcomes: A Comparative Study. *Journal Fiscal Studies*, 32(2), 200–221.
- [21] Suherman. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan TRANSPARANSI DAN AKUNTANBILITAS. *Unizar Law Review*, 8(1), 134–141.
- [22] Hartono, H. (2025). Indonesian Research Journal on Education. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(17), 2666–2672.
- [23] Johnstone, D. B., & Marcucci, P. N. (2007). Worldwide trends in higher education finance: Cost-sharing, student loans, and the support of academic research. *Issue Brief. Institute for Higher Education Policy*.
- [24] UNDP. (2022). *No Tit Human Development Report 2021-22le*.
- [25] Satriadi, Ansar, L., & Hasmiyati. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(1), 83–91.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i4.2083

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [26] Sukmawati, Y., Fauzi, A. M., & Wijayanto, H. (2021). Strategi Transformasi Sistem Manajemen Riset Perguruan Tinggi Indonesia Menuju World Class University. Scientific Repository Institut Pertanian Bogor, 1–90.
- [27] World Bank. (2020). Spending for Better Results.
- [28] Sain, K., & Bozkurt, K. (2023). The Effect of Human Capital as an Output of Education on Productivity: A Panel Data Analysis for Developing Countries. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), 7–31. <https://doi.org/10.29329/epasr.2023.631.1>
- [29] Kousky, C., Brown, L., & Green, R. (2018). Budget Cuts and Public Service Delivery: Evidence From Healthcare and Education. *Journal Public Policy*, 39(1), 25–47.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i4.2083

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).